

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA KENTEN LAUT KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN BANYUASIN

Oleh :

Nama : Falya Fransiska

Nim : 20.11.119

Program Studi : Administrasi Negara

ABSTRACT

Falya Fransiska, 2024, The Role of Village Government in Community Empowerment in Kenten Laut Village, Talang Kelapa District, Banyuasin Regency, Department of State Administration at the Satya Negara College of Administrative Sciences (STIA), Main Advisor (I) Rahmawati, SH., M. Si and Assistant Advisor (II) Asmawati, S.Sos., M.Sc.

This research was conducted at the Kenten Laut village office, Talang Kelapa District, Banyuasin Regency, located at Jalan A. Nakowi No. 17 RT 14 Dusun II Kenten Laut, postal code 30761. This research was conducted from March 5, 2024 to May 20, 2024. The formulation of the problem in this study is how is the Role of the Village Government in Community Empowerment in Kenten Laut Village, Talang Kelapa District, Banyuasin Regency. The purpose of this study is to determine the Role of the Village Government in Community Empowerment in Kenten Laut Village. The research method used is a qualitative method.

Based on the results of the study from the discussion, it can be concluded that the Role of Village Government in Community Empowerment in Kenten Laut Village has been implemented quite well. because all activities have been implemented and run in accordance with existing empowerment.

Keywords: Role of Government, Community Empowerment

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tujuan nasional sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan oleh penyelenggara Negara yaitu lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara bersama-sama segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada dibawah pemerintahan kabupaten. Kelurahan dan desa merupakan dua organisasi yang berbeda status meskipun berkedudukan sejajar dan keduanya

sama-sama melaksanakan tugas pemerintahan serta sama-sama berada di wilayah kecamatan. Kelurahan merupakan satuan kerja perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang tidak memiliki hak otonomi, sedangkan Desa merupakan unit/satuan tingkatan pemerintahan terendah dan bukan merupakan bagian dari daerah Kabupaten/Kota.

Peran dan prakarsa pemerintah sangat dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan kesejahteraan desa. Kesadaran kepala desa sebagai pimpinan pemerintah desa atau aktor dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah desa menjadi ujung tombak pelaksanaan dan terlaksananya pembangunan serta pengembangan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Desa juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dalam hal peningkatan kesejahteraan, pemerintah melakukan upaya dengan membuat suatu kebijakan yang mengarah pada pemberdayaan.

Dengan demikian, Desa merupakan suatu wilayah yang sangat memerlukan pembangunan dan pengembangan khususnya basis ekonomi. Pembangunan ini merupakan suatu usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan baik itu pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, maupun kesenjangan antara Desa dan kota. Disamping itu, pembangunan pedesaan di pandang juga sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana atau meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup di bidang pendidikan, kesehatan maupun perumahan (Satika Rani, 2018 : 15-16)

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh.

Tugas pemerintah desa yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Untuk itu pembangunan, pembinaan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat desa harus benar-benar di laksanakan oleh pemerintah desa guna terselenggaranya pemerintahan yang baik dan efisien demi kemaslahatan masyarakat desa. Pemberdayaan.

Pemerintah Desa Kenten Laut harusnya memberi bantuan untuk pemberdayaan melalui pembinaan serta bantuan dana agar program tersebut dapat berkembang dan bermanfaat bagi keluarga dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat. Perekonomian akan berkembang apabila adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat.

Adapun masalah yang di temukan di Desa Kenten Laut itu sendiri ialah Pemerintah Desa masih belum melakukan pemberdayaan masyarakat yang dimana seharusnya di dalam desa ada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah. Karena salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat Desa ialah untuk meningkatkan kualitas Desa dan menjadikan Desa

menjadi lebih baik lagi, hal ini tentunya harus diawali dengan peranan.

Berdasarkan masalah tersebut tentunya peneliti tertarik ingin mengetahui sejauh mana keaktifan Pemerintah Desa dalam melaksanakan peranannya sebagai Pemerintah Desa Kenten Laut. Oleh karna itulah peneliti ingin mengambil judul penelitian tentang : **“Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas adapun permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti adalah Bagaimanakah Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

B. LANDASAN TEORI

Pengertian Peran

Istilah peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang yang melakukan hak dan kewajiban berarti telah menjalankan suatu peran, kita selalu menulis kata peran tetapi kadang sulit mengartikan dan mendefinisikan peran tersebut, peran bisa juga disandingkan dengan fungsi, peran dan status tidak dapat dipisahkan, tidak ada peran tanpa ada kedudukan atau status. Begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan. hidupnya di masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku.

Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku balk itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.

Pengertian Peran Pemerintah

Sebagai pimpinan pemerintah desa atau aktor dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah desa menjadi ujung tombak pelaksanaan dan

terlaksananya pembangunan serta pengembangan kesejahteraan masyarakat desa. Penugasan dari Pemerintah atau Pemerintah daerah kepada Desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan Masyarakat desa.

Peran Dan Fungsi Pemerintah Desa

Kehadiran pemerintah dan Keberadaan Pemerintah adalah suatu yang menjadi keharusan bagi proses dan Kewajiban dalam kehidupan masyarakat, sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat sekecil apapun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kenten Laut penulis menggunakan Teori Peran Pemerintah Desa dengan 4 indikator yang dikemukakan oleh (Nurdin, 2014), yaitu Peran Pemerintah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator.

1. Peran Pemerintah Desa Sebagai Regulator

Peran Pemerintah sebagai regulator yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraa pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

2. Peran Pemerintah Desa Sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah.

3. Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berberba pihak dalam pembangunan daerah).

4. Peran Pemerintah Desa Sebagai Katalisator

Peran pemerintan sebagai katalisator yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi.

Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan memiliki pengertian sebuah proses untuk berdayaguna sehingga dapat mengubah masyarakat menjadi lebih baik keadaan

kehidupannya. Menurut Sumardjo, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan kesempatan, kemauan/motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk dapat akses terhadap sumberdaya, sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan masa depan sendiri dengan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan komunitasnya (M.Askin, 2022).

Tujuan dari pemberdayaan menurut Sulistiyani (2004) adalah untuk membentuk individu dan Masyarakat yang mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

Pengertian Masyarakat

Menurut Linton Masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga dapat terbentuk organisasi yang mengatur setiap individu dalam masyarakat tersebut dan membuat setiap individu dalam masyarakat dapat mengatur diri sendiri dan berfikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batasan tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat pada umumnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Manusia yang hidup bersama, sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang;
2. Bercampur/bergaul dalam jangka waktu yang cukup lama;
3. Sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan;
4. Merupakan suatu sistem hidup bersama.

Prinsip dan Dasar Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno, 2005: 18) ada lima macam, yaitu:

1. Pendekatan dari bawah (bottom up approach) : Pada kondisi ini pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
2. Partisipasi (participation) :

Dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.

3. Konsep keberlanjutan :

Merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan Masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.

4. Keterpaduan :

yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.

5. Keuntungan sosial dan ekonomi :

merupakan bagian dari program pengelolaan.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan ada tahapan yang harus dilakukan, menurut Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto (2007) ada 3 tahapan pemberdayaan, yaitu:

- 1) penyadaran, tahap penyadaran, masyarakat yang menjadi subjek pemberdayaan diberi penyadaran bahwa setiap manusia mempunyai potensi yang dapat dikembangkan
- 2) pengkapasitasan, tahap pengkapasitasan dapat dicapai apabila masyarakat sudah mempunyai kemampuan untuk menerima daya. Tahap ini sering juga disebut dengan capacity building yang meliputi manusia, organisasi, dan sistem nilai
- 3) pendayaan, tahap ketiga adalah pemberian daya dimana masyarakat diberikan daya, otoritas, atau peluang untuk berkembang mencapai kemandirian. Pemberian daya disesuaikan dengan kualitas kecakapan masing-masing individu

Proses dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto (2006:59) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, yang memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam.

Indikator pemberdayaan menurut Soeharto (2011 : 50) paling tidak memiliki empat hal yaitu :

1. Kegiatan yang terencana dan kolektif

Pemberdayaan berhubungan dengan kegiatan yang terencana dan kolektif merupakan dasar dari program pemberdayaan yang dibuat. Tentunya dalam hal pelaksanaan program pemberdayaan dimulai dari sebuah rencana yang matang dan dibahas dalam musyawarah

rencana pembangunan desa (musrenbang-Desa) dan musyawarah Desa (musdes).

Dalam pembuatan rencana secara kolektif melibatkan peran antar pelaku desa baik LPM Desa, Kepala Desa, Tokoh masyarakat dan unsur-unsur yang ada di masyarakat. Tentunya dalam hal ini melibatkan partisipasi masyarakat desa. Dasar kegiatan terencana dan kolektif ini, digagas oleh lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dengan menampung aspirasi masyarakat desa dalam kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa setempat.

2. Memperbaiki kehidupan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat tentunya dapat memperbaiki kehidupan masyarakat, artinya segala bentuk kegiatan pemberdayaan yang di berikan kepada 95 masyarakat dirasakan dapat memberikan manfaat yang berarti bagi kelangungan hidup individu atau masyarakat desa.

3. Prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung

Pemberdayaan masyarakat desa dapat dikaitkan dengan pemenuhan kelompok masyarakat yang lemah atau kurang beruntung. Sasaran pemberdayaan ditujukan pada individu atau kelompok masyarakat yang masih lemah atau kurang berdaya dengan keadaan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Program bantuan sosial yang disubsidi pemerintah pusat dan Daerah kepada kelompok warga miskin belum dapat memperbaiki kehidupan perekonomian masyarakat, seperti program Bantuan Lansung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), jaminan kesehatan masyarakat miskin (Jamkesmas) dan lain sebagainya masih kurang efektif dan dirasakan kurang tepat sasaran.

4. Dilakukan melalui program peningkatan kapasitas

Pemberdayaan masyarakat desa perlu di ikuti dengan program peningkatan kapasitas. Hal ini dimaksudkan agar pemberdayaan memerlukan pendampingan ataupun penyuluhan kepada warga masyarakat. Peningkatan kapasitas dapat dilakukan dengan menumbuh kembangkan kegiatan organisasi atau kelompok 96 dengan berdirinya Usaha masyarakat kecil menengah (UMKM) ataupun dengan memperkuat program badan usaha milik desa (BUMDES) dalam membantu kegiatan usaha ekonomi masyarakat miskin.

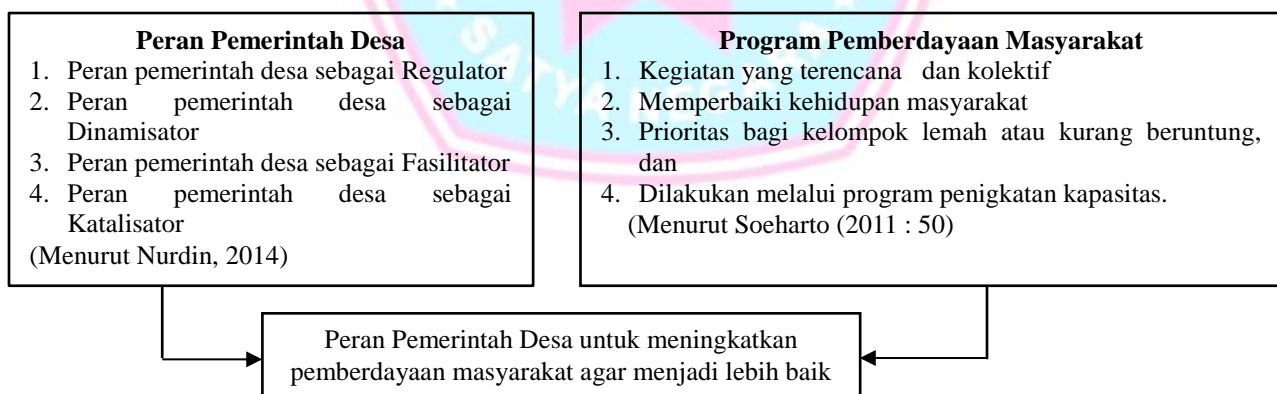
Sedangkan dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna sebagai dorongan atau motivasi, bimbingan, serta pendampingan dalam

meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri, upaya tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses pemberdayaan dalam mengubah perilaku, mengubah kebiasaan lama menuju perilaku baru yang lebih baik, dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya.

Pemberdayaan juga memiliki makna kesetaraan, adil demokratis tanpa ada tekanan atau dominasi dalam suatu komunitas atau masyarakat. Perbedaan karakter dan kemampuan individu adalah suatu keniscayaan. Namun setiap individu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Realitas kesetaraan dan perbedaan individu ini akan menjadi prinsip dalam melakukan pemberdayaan, dengan demikian proses meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk berdaya yang dilakukan secara demokratis agar mampu memabangun diri dan lingkungannya dalam meningkatkan kualitas kehidupannya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera. Fokus pemberdayaan dapat bersifat individu dan juga komunitas berarti proses meningkatkan kemampuan diri suatu komunitas dari suatu komunitas untuk dapat mengatur komunitasnya secara mandiri dan dilaksanakan secara bersama-sama. Pemberdayaan juga menekankan pada proses, bukan semata-mata hasil (output) dari proses tersebut.

Kerangka Berfikir

Gambar Kerangka Berpikir



C. PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisa maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang teliti dengan penjelasan secara terperinci tentang permasalahan yang terhubung

Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala Desa mempunyai peranan dan tanggung jawab yang sangat berat karena selain menyelenggarakan urusan pemerintahan, Kepala Desa dan juga merangkap sebagai pengusaha tunggal dibidang Pembangunan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan Pemerintahan Desa dalam hal pemberdayaan masyarakat maka diperlukan kerja sama antara pemimpin dan masyarakat yang diharapkan dalam hal ini peran aktif dari masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Karena dalam proses pemberdayaan masyarakat, masyarakat Desa ditempatkan dalam posisi ganda yakni sebagai subjek dan objek pemberdayaan masyarakat. Sebagai subjek pemberdayaan masyarakat, masyarakat Desa memiliki tanggung jawab untuk membesarkan partisipasi dan kontribusi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Sedangkan sebagai objek program pemberdayaan, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari dan kemajuan yang dicapai dan proses pemberdayaan masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat tersebut sangat diperlukan kerja sama antara pemimpin dan yang dipimpin. Kerangka pikir dalam penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :

dengan teori dan data yang ada, sehingga mendapat suatu kesimpulan (Suyanto,2005 : 166).

Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian kualitatif yang memperhatikan humanisme atau individu manusia dan perilaku manusia merupakan jawaban atas kesadaran bahwa semua akibat dari

perbuatan manusia terpengaruh pada aspek-aspek internal individu. Aspek internal tersebut seperti kepercayaan, pandangan politik, dan latar belakang sosial dari individu yang bersangkutan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

Definisi Konsep

Sejumlah definisi konseptual yang menjadi pengangan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Peran pemerintah desa merupakan peran yang penting dalam mensejahterakan masyarakat. Sebagai lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, Pemerintah Desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintah, memberikan pelayanan publik, dan mengembangkan wilayahnya secara berkelanjutan. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk

mensejahterakan masyarakat. Di antaranya adalah program pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, program kesehatan, program pendidikan, dan program lingkungan hidup.

2. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu pernyataan dalam bentuk yang khusus dan merupakan kriteria yang bisa diuji secara empiris (Pasolong, 2013:86). Dalam penelitian ini definisi operasional terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Definisi Operasional

No	Konsep	Indikator
1	Peran Pemerintah Desa (Menurut Nurdin, 2014)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran pemerintah desa sebagai Regulator 2. Peran pemerintah desa sebagai Dinamisator 3. Peran pemerintah desa sebagai Fasilitator 4. Peran pemerintah desa sebagai Katalisator
2	Pemberdayaan Masyarakat (Menurut Soeharto (2011 : 50)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan yang terencana dan kolektif 2. Memperbaiki kehidupan masyarakat 3. Prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, dan 4. Dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.

Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi yang ada adalah istilah kata informan yang nantinya akan diwawancarai secara mendalam yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian. informan pada penelitian kualitatif dipilih dan ditentukan dalam pertimbangan-pertimbangan tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti

Tabel Informasi Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Kasi Pemerintahan	1 Orang
3	Ketua PKK	1 Orang
4	Masyarakat	2 Orang
	Jumlah	5 Orang

Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau penguji dan mencapai tujuan penelitian. Oleh

karena itu, data dan kualitas data hasil dalam penelitian. Data di peroleh dari suatu proses yang disebut pengumpulan data. Menurut Uber Silalahi (2009:208). Pengumpulan data adalah suatu proses mendapatkan empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu.

Pengertian diatas dapat diketahui bahwa proses pengumpulan data adalah proses dan mengumpulkan berbagai hal yang akan digunakan sebagai bahan penelitian.

1. Observasi

Pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian untuk melihat fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari subjek penelitian secara langsung digunakan untuk mendapatkan data tentang peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat serta factor pendukung dan penghambat dalam memberdayakan masyarakat di Desa Kenten Laut.

2. Wawancara
Peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan narasumber (key informan) dengan berpedoman pada interview-guidances yang telah disusun sebelumnya.
3. Dokumentasi
Peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, seperti buku, jurnal, surat kabar, dan lain sebagainya untuk mendapatkan data kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan data perangkat Desa Kenten Laut, dan foto-foto kegiatan.
4. Studi Pustaka
Studi pustaka merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan berbagai informasi, sesuai dengan topik yang sedang diteliti yaitu dengan cara menggali berbagai informasi yang bersumber dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan dan sumber lainnya baik secara tertulis maupun dari media elektronik. Kegunaan dari studi pustaka ini adalah untuk menjelaskan variabel yang menjadi topik dalam penelitian.

Teknik Analisa Data

Teknik analisis data menurut Sugiyono (2018:482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Sedangkan menurut Moleong (2017:280-281) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Ketepatan dan keakuratan data yang terkumpul sangat diperlukan, namun tidak dapat pula dipungkiri bahwa sumber informasi yang berbeda akan memberikan informasi yang berbeda pula. Pekerjaan menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan penerahan tenaga fisik dan pikiran sendiri. Selain menganalisis data, peneliti juga perlu mendalami kepustakaan guna mengonfirmasikan teori.

Data penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus-menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian menggunakan model Miles and Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2018:246) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman menawarkan pola umum analisis dengan mengikuti model interaktif sebagai berikut :

Menurut Sugiono (2018:247-253) aktivitas yang dilakukan dalam analisis data yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1.Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

2. Penyajian Data (Data Display).

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Selain itu dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang

setelah penelitian berada dilapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Bab ini berisi seluruh kegiatan penelitian dari hasil Observasi, Wawancara, Dokumentasi, Dan Study Pustaka Di Instansi. Hasil penelitian tersebut membahas mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Pengkajian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil gambaran secara mendalam dan menyeluruh mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan konsep pertama yaitu tentang Peran Pemerintah Desa ada 4 indikator : Peran Pemerintah Desa sebagai Regulator, Peran Pemerintah Desa sebagai Dinamisator, Peran Pemerintah Desa sebagai Fasilitator, dan Peran Pemerintah Desa sebagai Katalisator. Dan berdasarkan konsep kedua yaitu tentang Pemberdayaan Masyarakat ada 4 indikator : Kegiatan yang terencana dan kolektif, Memperbaiki kehidupan masyarakat, Prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, dan Dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.

A. Peran Pemerintah Desa

Pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa. Dengan itu pemerintah desa khususnya pemerintah daerah harus memberikan sumbangsi dalam sistem kebijakan, membuat program-program dan memberikan peluang usaha terhadap masyarakat karena dengan adanya pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa, pemberdayaan juga merupakan proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi masyarakat agar memiliki kemampuan dan keberdayaan. Oleh karena itu peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam membuat kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai, sehingga

masyarakat dapat mengembangkan diri dengan meningkatkan pengetahuan. Dalam strategi ini, pemerintah desa memberikan 4 peran yaitu sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator dan Katalisator.

1. Peran Pemerintah Desa Sebagai Regulator

Peran Pemerintah sebagai regulator yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraa pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menganalisa tentang Peran Pemerintah Desa Sebagai Regulator di Desa Kenten Laut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa belum cukup baik dalam mengatur kapan akan dilakukan kegiatan pemberdayaan tapi Pemerintah Desa telah mengupayakan agar perencanaan tersebut terjadi tetapi untuk pemberdayaan yang sudah dijalankan pemerintah hanya sekali memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarkat karena itu pemberdayaan belum berjalan dengan efektif.

2. Peran Pemerintah Desa Sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian pembinaan intensif dan efektif kepada masyarakat. Pembinaan dan pengarahan ini sangat penting bagi pemberdayaan masyarakat, diperlukan memelihara dinamika badan tertentu yang dapat memberikan pembinaan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menganalisa tentang Peran Pemerintah Desa Sebagai Dinamisator di Desa Kenten Laut, dapat disimpulkan, bahwa pemerintah desa belum cukup baik untuk membuat masyarakat untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan pemerintah desa.

3. Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berberba pihak dalam pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pembinaan dan pendanaan/permodalan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis tentang Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator di Desa Kenten Laut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa belum cukup optimal karena hanya memberikan saja tanpa memberikan penyuluhan dan masyarakat yang tidak berkonsultasi lagi setelah mendapat bantuan.

4. Peran Pemerintah Desa Sebagai Katalisator

Peran pemerintan sebagai katalisator yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting sebagai katalisator pembangunan tatanan masyarakat. Selain itu peran pemerintan tidak hanya mewujudkan kesejahteraan masyarakat saja, melainkan juga mewujudkan tatanan masyarakat yang baik di berbagai aspek kehidupan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis tentang Peran Pemerintah Desa Sebagai Katalisator di Desa Kenten Laut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa masih kurang aktif dalam kegiatan penyuluhan dan menerima keluhan dari masyarakat serta dari masyarakat yang merasa sudah bisa menjalankan dengan tidak memberitahukan keadaan ternak kepada pemerintah desa menyebabkan kegagalan dalam ternak tersebut.

B. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dapat dibedakan atas pemberdayaan ke dalam dan pemberdayaan ke luar. Pemberdayaan ke dalam adalah suatu daya dan upaya untuk mentransformasikan kesadaran masyarakat sekaligus bertujuan untuk mendekatkan masyarakat dengan akses perbaikan kehidupannya. Sedangkan pemberdayaan ke luar adalah suatu usaha untuk melakukan perubahan atas berbagai kebijakan-kebijakan yang selama ini merugikan sebagian esar masyarakat. Dalam arti bahwa sebagai pengendali yang berbasis pada pemberian ruang yang sebesar-besarnya kepada partisipasi aktif masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan.

Sedangkan Menurut Suharto (2006:59) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang

berdaya, yang memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam.

1. Kegiatan yang terencana dan kolektif

Pemberdayaan berhubungan dengan kegiatan yang terencana dan kolektif merupakan dasar dari program pemberdayaan yang dibuat. Tentunya dalam hal pelaksanaan program pemberdayaan dimulai dari sebuah rencana yang matang dan dibahas dalam musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbang-Desa) dan musyawarah Desa (musdes).

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa memiliki rencana untuk pemberdayaan berikutnya dan untuk lebih efektif pengumuman lewat media yang biasa dipakai untuk masyarakat.

2. Memperbaiki Kehidupan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat tentunya dapat memperbaiki kehidupan masyarakat, artinya segala bentuk kegiatan pemberdayaan yang di berikan kepada 95 masyarakat dirasakan dapat memberikan manfaat yang berarti bagi kelangungan hidup individu atau masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya pemberdayaan memiliki makna memberikan dorongan atau motivasi, bimbingan atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri. Upaya tersebut merupakan tahapan dari pemberdayaan dalam mengubah prilaku, mengubah kebiasaan lama menuju prilaku baru yang lebih baik, dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejheteraannya. Pemberdayaan dipandang sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat individu dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa cukup baik bisa meningkatkan pendapatan masyarakat tetapi alangkah baiknya Pemerintah Desa terus melakukan penyuluhan bertahap agar masyarakat bisa mengembangkannya dan memahami cara penternakan.

3. Prioritas Bagi Kelompok Lemah Atau Kurang Beruntung ; dan

Pemberdayaan masyarakat desa dapat dikaitkan dengan pemenuhan kelompok masyarakat yang lemah atau kurang beruntung. Sasaran pemberdayaan ditujukan pada individu atau kelompok masyarakat yang masih lemah atau kurang berdaya dengan keadaan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Program bantuan sosial yang disubsidi pemerintah pusat dan Daerah kepada kelompok warga miskin belum dapat memperbiki kehidupan perekonomian

masyarakat, seperti program Bantuan Lansung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), jaminan kesehatan masyarakat miskin (Jamkeskin) dan lain sebagainya masih kurang efektif dan dirasakan kurang tepat sasaran.

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa sudah sangat baik karena telah memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dan membantu mengurangi beban ekonomi mereka.

4. Dilakukan Melalui Program Peningkatan Kapasitas

Pemberdayaan masyarakat desa perlu di ikuti dengan program peningkatan kapasitas. Hal ini dimaksudkan agar pemberdayaan memerlukan pendampingan ataupun penyuluhan kepada warga masyarakat. Peningkatan kapasitas dapat dilakukan dengan menumbuh kembangkan kegiatan organisasi atau kelompok 96 dengan berdirinya Usaha masyarakat kecil menengah (UMKM) ataupun dengan memperkuat program badan usaha milik desa (BUMDES) dalam membantu kegiatan usaha ekonomi masyarakat miskin.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam program peningkatan kapasitas tersebut belum cukup baik karena kegiatan tersebut hanya dilakukan sekali alangkah baiknya pemerintah melakukan secara rutin agar memudahkan masyarakat lebih cepat memahami penyuluhan dan pelatihan tersebut.

PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Desa

1. Peran Pemerintah Desa Sebagai Regulator

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menganalisa tentang Peran Pemerintah Desa Sebagai Regulator di Desa Kenten Laut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa belum cukup baik dalam mengatur kapan akan dilakukan kegiatan pemberdayaan tapi Pemerintah Desa telah mengupayakan agar perencanaan tersebut terjadi tetapi untuk pemberdayaan yang sudah dijalankan pemerintah hanya sekali memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat karena itu pemberdayaan belum berjalan dengan efektif.

Secara garis besar peran pemerintah desa sebagai regulator yang dilakukan oleh pemerintah desa belum cukup baik karena pelatihan dan penyuluhan yang hanya diberikan diawal pemberdayaan saja serta kurangnya inisiatif masyarakat dalam menjalankan pemberdayaan.

2. Peran Pemerintah Desa Sebagai Dinamisator

Berdasarkan hasil penelitian menurut penulis

tentang Peran Pemerintah Desa Sebagai Dinamisator di Desa Kenten Laut dapat disimpulkan, bahwa pemerintah desa belum cukup baik untuk membuat masyarakat untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan pemerintah desa.

Secara garis besar peran pemerintah desa sebagai dinamisator yang dilakukan oleh pemerintah desa masih kurang memuaskan dikarenakan belum bisa membuat masyarakat antusias mengikuti pemberdayaan tersebut.

3. Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator

Berdasarkan hasil penelitian menurut penulis tentang Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator di Desa Kenten Laut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa belum cukup optimal karena hanya memberikan saja tanpa memberikan penyuluhan dan masyarakat yang tidak berkonsultasi lagi setelah mendapat bantuan.

Secara garis besar peran pemerintah sebagai fasilitator yang dilakukan pemerintah desa belum cukup optimal dikarenakan masyarakat yang tidak menerima penyuluhan yang cukup untuk bekal dalam pemberdayaan yang dijalankan.

4. Peran Pemerintah Desa Sebagai Katalisator

Berdasarkan hasil penelitian menurut penulis tentang Peran Pemerintah Desa Sebagai Katalisator di Desa Kenten Laut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa masih kurang aktif dalam kegiatan penyuluhan dan menerima keluhan dari masyarakat serta dari masyarakat yang merasa sudah bisa menjalankan dengan tidak memberitahukan keadaan ternak kepada pemerintah desa menyebabkan pemberdayaan belum maksimal.

Secara garis besar peran pemerintah desa sebagai katalisator yang dilakukan peran pemerintah desa belum cukup baik dikarenakan kurang memberikan penyuluhan dan pelatihan membuat masyarakat kurang memahami serta masyarakat yang tidak ada aktif untuk memberikan keluhan kepada pemerintah desa.

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Kegiatan Yang Terencana Dan Kolektif

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa memiliki rencana untuk pemberdayaan berikutnya dan untuk lebih efektif pengumuman lewat media yang biasa dipakai untuk masyarakat.

Secara garis besar kegiatan yang terencana dan kolektif oleh pemerintah desa kenten laut cukup baik karena sudah ada perencanaan yang matang untuk pemberdayaan selanjutnya.

2. Memperbaiki Kehidupan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa cukup baik bisa meningkatkan pendapatan masyarakat tetapi alangkah baiknya Pemerintah Desa terus melakukan penyuluhan bertahap agar masyarakat bisa mengembangkannya dan memahami cara penternakan.

Secara garis besar memperbaiki kehidupan masyarakat yang dilakukan pemerintah desa kenten laut belum cukup optimal dikarenakan pemerintah yang kurang aktif untuk memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat.

3. Prioritas Bagi Kelompok Lemah Atau Kurang Beruntung, dan

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa sudah sangat baik karena telah memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dan membantu mengurangi beban ekonomi mereka.

Secara garis besar prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung yang dilakukan pemerintah desa kenten laut sudah sangat baik karena pemerintah sudah memberikan bantuan tepat kepada yang membutuhkan mulai dari lansia, anak sekolah serta masyarakat yang kurang beruntung.

4. Dilakukan Melalui Program Peningkatan Kapasitas

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam program peningkatan kapasitas tersebut belum cukup baik karena kegiatan tersebut hanya dilakukan sekali alangkah baiknya pemerintah melakukan secara rutin agar memudahkan masyarakat lebih cepat memahami penyuluhan dan pelatihan tersebut.

Secara garis besar dilakukan melalui program peningkatan kapasitas oleh pemerintah desa kenten laut masih belum optimal dikarenakan pemerintah desa yang pasif dalam memberikan penyuluhan yang membuat masyarakat kurang memahami pemberdayaan yang ada.

Adapun faktor penghambat Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan di Desa Kenten Laut yaitu kurangnya pelatihan, penyuluhan dan dana yang belum ada serta masyarakat yang kurang inisiatif untuk menjalankan pemberdayaan sehingga pemberdayaan tersebut belum berjalan dengan baik

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Peran Pemerintah

Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa telah terlaksana namun belum cukup maksimal, dikarenakan pelatihan dan penyuluhan yang diberikan pemerintah desa yang hanya sekali dilakukan membuat masyarakat kurang memahami pemberdayaan yang dijalankan dan kurangnya minat masyarakat dalam menjalankan pemberdayaan yang sudah di adakan oleh pemerintah membuat pemberdayaan yang sudah dilaksanakan menjadi belum optimal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan maka peneliti dapat memberikan saran kepada pihak Pemerintah Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa sebaiknya memberikan perhatian lebih terhadap masyarakat untuk melakukan pelatihan dan pembinaan secara intensif agar pelatihan yang diberikan kepada masyarakat dapat meningkatkan kualitas masyarakat. Pemerintah Desa Kenten Laut perlu bekerja sama dengan ahli ternak lele untuk memberikan arahan dan pelatihan agar masyarakat memiliki minat yang tinggi terhadap pemberdayaan sehingga program yang dijalankan tepat sasaran dan tepat guna dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

F. DAFTAR PUSAKA

- Andini. (2010) "Peran Pemerintah Gampong dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Gampong Lhong Raya Kota Banda Aceh".
- Askin, M., Rusli, A., Nadila, N., Nurfaidzin, N., Subrata, A. B., Aziz, R., ... & Achmad, M. F. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Desa Lengkong Melalui Pelatihan Ms Office. *Maspul Journal Of Community Empowerment*, 4(1), 22-28.
- Alromaihi, MA, Alshomaly, ZA, & George, S. (2017). Kepuasan kerja dan kinerja karyawan: Sebuah tinjauan teoritis tentang hubungan antara kedua variabel tersebut. *Jurnal Internasional Penelitian Lanjutan di Manajemen dan Ilmu Sosial*, 6(1), 1-20.
- Bagong, Suyanto. Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Yogyakarta : Pustaka
- Edi, Suharto. 2011. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Harbani, Pasolong. 2013. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung : CV.Alfabeta

- Ita Ulumiyah. (2019) “Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)”.
- Larosa, Adelia. 2017. Pengaruh Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan (P2MB) Dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Linton, Ralph. *The Study Of Man*, New York. Appleton Press
- M. Nurdin, S. Nurmaeta, and M. Tahir, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa," *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 4, no. 1, 2014.
- Moleong, L. J. (2017) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rodakarya
- Ramdayanti, E., Argenti, G., & Marsingga, P. (2021). *The Role Of The Government In Empowerment Of The Fisherman Community In Ciparagejaya Village, Karawang Regency*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 194-201.
- Riyadi, 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta. Gramedia.
- Sarundajang, S.H., *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 2002.
- Satika Rani. Skripsi. 2018. *Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Islam*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Sigit. (2011) “Peranan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidoagung kecamatan Godean Kabupaten Sleman”.
- Sri Susanti. (2015) “Peranan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai”.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. *Kemitraan dan Model – Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Gaya Media Soekanto Soerdjono. 2009, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta : PT Raja GRafindo Persada
- Sutrisno, D. (2005) “Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Peningkatannya dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi Mendut Kabupaten Semarang.” Tugas Akhir tidak diterbitkan, Progam Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang
- Suharto, E., (2006), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit Alfabeta, Bandung
- Triaturrahman. (2015-2016) “Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat Adat Bayan di Lombok Utara”.
- Ulber, Silalahi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Wrihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, (2007). *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktek*. (Jakarta: Pustaka Kencana Prenada Media Group)

Dokumen-dokumen :

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.